



HARRY AZHAR AZIS

## Himpunan Mahasiswa Islam dan Kesejahteraan: Konteks Indonesia

**ABSTRAKSI:** Tujuan didirikannya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) pada tanggal 5 Februari 1947 adalah ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di alam Indonesia merdeka, Islam dapat berkembang dan menjadi wadah perkembangannya. Indonesia dan Islam menyatu di organisasi ini sejak berdiri. Tema ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an selalu menjadi sifat dan karakternya. Diimbuh semangat muda mahasiswa, Indonesia dan Islam menjadi bergairah. Di HMI, Islam dan Indonesia tidak sebarusnya dipisahkan, tidak ada split atau dikotomi, dan diajarkan dalam setiap perkaderan. Dalam sejarah organisasi ini, Islam dan Indonesia tidak pernah pecah sampai di era 1980-an, dalam kasus asas tunggal Pancasila, dan dua tema itu berkontraksi di kalangan para pendukungnya, termasuk di HMI, sampai rejim Orde Baru tenggelam pada akhir tahun 1990-an. Di era kebebasan informasi dan demokrasi sekarang ini, justru tema kemahasiswaan, ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an seperti memperoleh tempatnya kembali di HMI. Tetapi, jauh lebih penting lagi sekarang ini, dalam momentum 68 tahun HMI berdiri dan ikut mengawal perjalanan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai tujuan HMI, sejauh mana tujuan itu telah tercapai. HMI telah berhasil ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan, serta meluruskan pelaksanaan ideologi dan konstitusi negara Indonesia. Kini, HMI ditantang untuk terus mengawal kebijakan negara agar menguntungkan semua penduduk Indonesia menjadi lebih beriman dan berilmu, maju dan modern, serta adil dan sejahtera.

**KATA KUNCI:** Himpunan Mahasiswa Islam, negara Indonesia, proses kaderisasi, tantangan dan peluang, refleksi dan aksi, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**ABSTRACT:** "Muslim Students Association and Welfare: An Indonesian Context". The establishment of HMI (Muslim Students Association) on 5th February 1947 was to participate in maintaining the independence of Indonesia. In the realm of Indonesian independent, Islam can flourish and Indonesia became an umbrella for the development of Islam. Indonesia and Islam are together in the body of the HMI since its inception. Themes of "Indonesia" and "Islam" have always been the nature and character of HMI. Imbued with the spirit of a young student, Indonesia and Islam became excited. In the HMI, Islam and Indonesia should not be separated, there is no split or dichotomy, and taught in every training of HMI's cadres. In the history of HMI, Islam and Indonesia has never broken up in the 1980s, in the case of "Pancasila", and two themes were contracted among his supporters, including in the HMI, until the New Order regime step down in the late 1990s. In the era of freedom of information and democracy today, precisely the theme of the "student", "Indonesian", and "Islam" like obtaining its place again in the HMI. But, more importantly now is after 68 years of HMI stands and participate to guard the achievement journey of the goals of nation-state, in accordance with the goals of the HMI, how far the objectives have been achieved. HMI has managed successfully to defend the Indonesian independence, and HMI has also successfully participated to straighten the implementation of the ideology and constitution of Indonesia's nation-state. Now, HMI is challenged to continue in guarding the nation-state policies in order to benefit all Indonesian people to become more faithful and knowledgeable, advanced and modern, as well as fair and prosperous.

**KEY WORD:** Muslim Students Association, Indonesian nation-state, regeneration process, challenges and opportunities, reflection and action, and fair and prosperous of Indonesian society.

**About the Author:** Dr. Harry Azhar Azis adalah mantan Ketua Umum PB HMI (Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam) periode 1983-1986; dan sekarang menjabat sebagai Ketua BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) di Jakarta. Untuk kepentingan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat email: [ha\\_azis@yahoo.com](mailto:ha_azis@yahoo.com)

**How to cite this article?** Azhar Azis, Harry. (2016). "Himpunan Mahasiswa Islam dan Kesejahteraan: Konteks Indonesia" in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Vol.1(1), February, pp.43-54. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, ISSN 2443-1776.

**Chronicle of the article:** Accepted (August 3, 2015); Revised (December 5, 2015); and Published (5 February 2016).

## PENDAHULUAN

Suatu kehormatan bagi penulis, lantaran diberi kesempatan ikut menyampaikan buah pikiran dalam acara yang sangat terhormat, yaitu peringatan hari lahir HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), sebuah organisasi mahasiswa berlingkup nasional pertama dan tertua di Indonesia (Tanja, 1982:4; dan Sitompul, 2010:5), dalam ulang tahunnya yang ke-68 pada tahun 2015. Organisasi yang didirikan tanggal 14 *Rabiul Awwal* 1366 *Hijriyah* ini, bertepatan dengan 5 Februari 1947 (Sitompul, 1976:13 dan 23; Barton, 1999:58; dan Latif, 2012:424), ternyata sampai kini masih merupakan organisasi mahasiswa yang besar dan berpengaruh di Indonesia.

Penulis katakan “besar”, karena jaringan HMI berikut anggota dan kadernya meluas ke seluruh Indonesia. Dimana ada PT (Perguruan Tinggi) formal, muncul HMI di sana. HMI juga “berpengaruh”, karena kiprah alumni-alumnyanya yang tersebar dimana-mana serta sepak-terjang dan perjuangan pengurus, kader, dan anggotanya di sepanjang sejarah organisasi ini. Pendapat tadi bukan klaim sepihak dari internal HMI semata-mata, melainkan juga diafirmasi (dibenarkan) oleh pihak di luar HMI.

Paling tidak, Greg Barton (1999 dan 2003) merupakan satu di antara pihak di luar HMI yang membenarkan hal itu. Dosen Senior di Deakin University, Australia, dan peneliti gerakan pembaharuan pemikiran Islam Indonesia tersebut telah melakukan riset ilmiah. Berdasarkan hasil risetnya, menyatakan bahwa HMI adalah kelompok mahasiswa modernis paling penting di Indonesia dengan jaringan alumni, yakni KAHMI (Korps Alumni HMI), yang sangat berpengaruh (Barton, 1999:63; dan Barton, 2003:xvii, 137 dan 426).

Dulu, kebetulan, sekitar sepertiga abad yang lampau (29-31 tahun silam), penulis juga pernah ikut merasakan denyut perjuangan HMI dan setia menyelenggarakan peringatan hari jadi HMI yang dikenal sebagai *Dies Natalis HMI*. Waktu itu, ketika organisasi mahasiswa ini memasuki usia yang ke-36

tahun, suatu periode yang cukup bersejarah di HMI dan penulis tengah mengemban amanat menjadi Ketua Umum PB (Pengurus Besar) HMI periode 1983-1986. Dengan demikian, dalam penglihatan penulis, peringatan hari jadi HMI bukan saja penting, tetapi juga – dengan beberapa pertimbangan – sudah sepantasnya dilakukan.

*Pertama*, ia dapat menjadi ajang dan memepererat tali silaturahmi antara para kader dan para alumni HMI, yang bertebaran di seluruh dunia dan – terutama – di seluruh wilayah Tanah Air. *Kedua*, ia dapat dijadikan ajang konsolidasi bagi seluruh kekuatan HMI dalam rangka ikut serta menyelesaikan persoalan keumatan dan kebangsaan. *Ketiga*, ia dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi kiprah perjuangan HMI dan KAHMI. *Keempat*, ia bukan saja dapat mendekatkan para kader dan para alumni HMI terhadap sejarah, melainkan juga menyadarkan tugas sejarah yang diembannya. *Kelima*, dalam kadar tertentu, peringatan *Dies Natalis HMI*, yang meriah, dapat memompa kegairahan kader-kader baru dalam beraktivitas di HMI.

## REGENERASI HMI: TANTANGAN DAN PELUANG

Apabila satu generasi diukur setiap 25 tahun, berarti anggota aktif HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sekarang ini sudah di ujung generasi ketiga; dan jika masih terus hidup 7 tahun lagi, HMI mulai memasuki generasi keempat di usia 75 tahun. Pimpinan dan anggota HMI saat ini akan merasakan hasil perkaderannya sekitar 10-20 tahun mendatang, atau beberapa diantaranya bisa lebih cepat lagi.

Tiap generasi HMI memiliki tantangan dan peluangnya masing-masing. Karakter zaman berbeda dan berubah (Chaldun, 1962:38; Madjid, 1992:Ixi dan Ixiv; dan PB HMI, 2013:6). Pada generasi pertama, anggota dan alumni HMI membangun fondasi organisasi dan secara bersamaan ikut mempertahankan kemerdekaan bangsa dalam pancaroba politik negara muda, yakni Indonesia (Sitompul,

2010:2). Hanya beberapa tokoh dari generasi ini yang mencapai puncak karier dalam kehidupan negara. Apabila rata-rata usia waktu masuk HMI sekitar 20 tahunan, berarti usia termuda pada generasi pertama, saat ini, adalah 63 tahun dan yang tertua adalah 88 tahun. Kini, usia generasi kedua HMI diperkirakan antara 38-63 tahun, sedangkan generasi ketiga, di bawah dari usia itu.

Pada generasi kedua, organisasi ini mulai dewasa dan ikut berperan membangun bangsa. Jika dikaitkan dengan pembabakan perjuangan HMI menurut Agussalim Sitompul (2010), maka generasi kedua berkiprah sejak 1969 sampai sekarang pada fase ketujuh, yaitu fase partisipasi HMI dalam pembangunan (Sitompul, 2010:2). Dari generasi ini, muncul tokoh-tokoh alumni HMI di posisi penting, di hampir semua sektor kehidupan negara dan swasta di Indonesia. Sebagian di antara mereka kini menduduki posisi-posisi penting dan ikut berperan mengubah masyarakat di lingkungannya.

Dalam konteks ini, kita selalu berharap agar mereka terus mengayuh arus cita HMI – sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Anggaran Dasar HMI – yaitu: “[...] *terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernafaskan Islam, yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa-Ta’ala*” (Rachman, 2011:878; dan PB HMI, 2013).

Dunia kerja yang digeluti alumni HMI pun beragam, mulai dunia politik, baik politik partai, negara, maupun daerah; birokrasi di pemerintah pusat dan lembaga negara serta pemerintahan daerah termasuk RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga); dunia pendidikan dan pendidikan tinggi dengan menjadi guru, dosen, dan guru besar; dunia usaha dengan menjadi pengusaha kecil, menengah, dan besar; serta di dunia profesional sebagai kaum profesional (Effendy, 2011); bahkan mungkin saja ada yang tetap menganggur sebagai MA (*Mahasiswa Abadi*), yang terus berjuang bersama mahasiswa yang masih aktif.

Generasi ketiga HMI, baik alumni maupun mahasiswa aktif, menghadapi perubahan yang tidak terbayang sebelumnya: *complicated*, *interconnected*, dan *globalized*. Dunia menyatu, jarak dan waktu menyempit, tetapi sekaligus terpisah (Piliang, 2011b). Bila pada generasi pertama, semangat komunal menonjol; maka di generasi ketiga, budaya dan kompetensi individual mengkristal. Teknologi memang telah membuat manusia menjadi individu, dan informasi masuk ke ruang individu dengan cara yang sangat individualistik (Piliang, 2011b:109-111). Beberapa informasi yang masuk ke kamar pribadi, tetapi diproduksi secara massif, bahkan mampu menggerakkan kebersamaan (*cf* Piliang, 2011a dan 2011b; dan Saptaningrum, 2011).

Pada era generasi pertama HMI, seperti dalam peristiwa 1966, kebersamaan dipicu oleh gerakan mahasiswa, termasuk HMI, yang kemudian didukung oleh kekuatan politik dan kelompok bersenjata (Sitompul, 2001:13-14). Di era akhir generasi kedua, atau awal generasi ketiga HMI, seperti peristiwa 1997/1998, kebersamaan dipicu oleh informasi melalui *gadget*, teknologi yang menyatukan gerakan mahasiswa dan unsur masyarakat lainnya secara meluas (Susanto, 2014).

Karakter zaman berubah, ketika HMI mencapai usia 50 tahun. Persamaan dari kedua peristiwa itu karena batin masyarakat banyak dengan mudah menyatu, karena tidak rela melihat kebijakan negara melenceng jauh dari cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa. Dalam dua peristiwa tersebut, HMI termasuk kelompok masyarakat yang selalu tampil di depan, karena sifat independensinya yang kritis (Barton, 1999:58-65). Menariknya, kendati tiap generasi mempunyai karakternya masing-masing, tema *kemahasiswaan*, *ke-Indonesia-an*, dan *ke-Islam-an* berdengung di setiap periode HMI (Sitompul, 2001:644-645; dan Latif, 2012:426). Artinya, menjadi mahasiswa adalah syarat keanggotaan HMI.

Tugas utama mahasiswa adalah belajar dan menguasai ilmu. Akan tetapi, penekanan belajar pada tiap generasi berbeda. Kata

“belajar” bisa diartikan bukan hanya di Perguruan Tinggi (Lunandi, 1987). Bahkan, HMI dianggap bentuk Perguruan Tinggi kedua, atau bagi sebagian lagi malah yang pertama. Jabatan di HMI dapat juga diartikan semacam sertifikat atau gelar tersendiri. Itu sebabnya selalu terjadi kompetisi ketat dan ramai, baik dalam setiap Rapat, Musyawarah, Konferensi, maupun Kongres HMI.

Sepertinya, *McClelland's Achievement Motivation Theory* (Teori Motivasi Berprestasi dari David McClelland) menemukan relevansinya dalam proses perkaderan dan aktivitas HMI. Stephen P. Robbins (2001) mengatakan bahwa *McClelland's Achievement Motivation Theory* memandang individu memiliki cadangan energi potensial, sedangkan bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung kepada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia (Robbins, 2001:173).

Uniknya, justru motivasi berprestasi itu pula yang membuat HMI sangat menarik. Roh berprestasi dan kompetisi telah merasuk kedalam anggota HMI. Bahkan, ia menjadi api yang tak kunjung padam dan terus mengalir kedalam darah para alumni HMI, begitu mereka masuk ke kancah aktualisasi. Kompetisi ini diramu dalam mekanisme organisasi, yang disebut “sistem demokrasi *a la* HMI”. Semangat demokrasi ditanam sejak perkaderan pertama dan terus dipupuk ke tingkat perkaderan tertinggi.

Dalam konteks itulah, sesungguhnya HMI berhutang pada struktur organisasi level terbawahnya, seperti Komisariat, atau di beberapa daerah, Cabang, yang konsisten dan perhatian utamanya adalah pelatihan dan perkaderan secara sistematis dan berjenjang. Terutama kepada Komisariat, karena di level inilah, pertama-tama, perekrutan para kader baru melalui LK (Latihan Kader) I, atau *Basic Training*, dilakukan. Pada struktur di atasnya, perkaderan memang masih menjadi pekerjaan utama pengurus HMI, tetapi nuansanya lebih pada *quality of competition* (kualitas kompetisi).

Kata *quality* bukan saja mengacu kepada *competency* (kompetensi atau kemampuan), tetapi juga *networking* (jaringan). Seseorang anggota bisa memperoleh jabatan di HMI, karena karakter dan kemampuan dirinya, tetapi bisa juga karena luasnya jaringan (*networking*) yang mendukungnya. Bila yang pertama menyangkut *individual capacity* (kapasitas individual), maka yang kedua adalah *social capacity* (kapasitas sosial) atau *political capacity* (kapasitas politik). Pola yang sama juga terjadi ketika mereka menjadi alumni HMI di tempat perjuangannya masing-masing. Dua faktor inilah, yaitu sistem perkaderan dan sistem demokrasi yang selalu dipertahankannya, yang membuat HMI tetap eksis hingga kini.

Lafran Pane, tokoh pendiri HMI, selalu menekankan bahwa berdirinya HMI adalah untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Sitompul, 1976:20; Sitompul, 1995:246; dan Latif, 2012:426). Di alam Indonesia merdeka, Islam berkembang dan menjadi wadah berkembangnya Islam. Indonesia dan Islam menyatu di HMI sejak awal berdirinya. Menurut Yudi Latif (2012), jika dinilai dari perspektif hari ini, maka pandangan nasionalistik dalam rumusan HMI tahun 1947 barangkali tidak tampak luar biasa. Namun, jika ditinjau dari standar tujuan organisasi-organisasi Islam pada masa itu, tujuan nasionalistik tersebut menandai sebuah pengakuan bahwa ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an tidaklah berlawanan, melainkan berjalani-berkelindan (Latif, 2012:426).

Keyakinan ini merupakan filosofi pendiri HMI. Para pemimpin awal HMI lebih bersedia menerima Pancasila (Latif, 2012). Karena itu, tema ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an selalu menjadi sifat dan karakter HMI. Dengan diimbui semangat muda, mahasiswa, Indonesia dan Islam menjadi bergairah. Di HMI, Islam dan Indonesia yang tidak seharusnya dipisahkan dan tiada *split* (perpecahan) atau dikotomi, diajarkan dalam setiap perkaderan.

Dalam sejarah HMI, Islam dan Indonesia tidak pernah pecah sampai di era 1980-an,

dalam kasus pemaksaan asas tunggal Pancasila (Shaleh, 1996; dan Malik, 2002). Pada era 1980-an, dua tema itu pernah berkontraksi dalam diri para pendukungnya, termasuk di HMI, tetapi isu tersebut sirna dengan sendirinya begitu rejim Orde Baru tenggelam pada akhir tahun 1990-an. Dengan demikian, di era kebebasan informasi dan demokrasi sekarang ini, justru tema kemahasiswaan, ke-Indonesia-an, dan ke-Islam-an seperti memperoleh tempatnya kembali di HMI.

Banyak alumni HMI generasi pertama telah mendahului kita, dan kini menjadi legenda. Sebagian generasi kedua HMI, juga sudah mulai pergi dan sebagian lagi menuju *sepuh* alias tua. Lalu, menjelang munculnya generasi keempat HMI, sebagian generasi ketiga mulai menunjukkan perannya masing-masing. Wajah HMI dari seluruh generasi merupakan lukisan indah warna-warni anggota, kader, dan alumni organisasi ini. Menariknya, walaupun ada warna hitam di sana-sini, dan kadangkala terlihat sangat hitam dalam lukisan itu, namun semakin hari lukisan itu kelihatan semakin hidup oleh warna-warna lain, seperti kuning, hijau, biru, dan merah, berikut tonjolan campurannya yang terus memberi harapan.

Jadi, sesungguhnya, harapan ke depan terletak pada generasi ketiga HMI sekarang, yang sedang bertungkus-lumus mengasah kualitas insancita HMI dan terus menantang arus kehidupan, memetik ilmu, dan beramal dengan ikhlas, serta terus mewujudkan mimpi sejahtera ilahiah, masyarakat adil dan makmur. Generasi keempat, *insha Allah*, mulai muncul di usia HMI ke-75 tahun nanti, bila dua faktor utama kesinambungan organisasi tetap dijaga, yakni: kaderisasi dan sifat demokrasi HMI.

Cita-cita berdirinya HMI terakumulasi dengan terus melahirkan kader-kader baru HMI. Kader lama menghilang, kader baru muncul. Satu pergi, seribu datang. Kader-kader itu seperti telur emas yang menetas ketika mereka menjadi alumni dan akan berkokok di masanya nanti. Dengan kian banyaknya alumni HMI yang mengambil peran, sesuai tujuan HMI di masa hidupnya, maka semakin

baiklah Indonesia ke depan dan semakin luas pula syariat Islam dipraktekkan.

Dalam konteks ini, mewujudkan masyarakat adil dan makmur – sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Anggaran Dasar HMI – adalah cita-cita HMI (PB HMI, 2013:2 dan 79). Dengan motto *Yakin Usaha Sampai*, apapun yang dicita-citakan, *insha Allah*, terwujud. Seperti bunyi *hymne*-nya, keberadaan HMI akan sangat berbeda dengan pameo *wujuduhu ka adamih* (ada tetapi seperti tiada). Sebagaimana kata Panglima Besar Jenderal Soedirman, Bapak Pendiri TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada masa revolusi, HMI harus hadir, tidak hanya menjadi *Harapan Masyarakat Islam*, tetapi juga menjadi *Harapan Masyarakat Indonesia* (Tanja, 1982).

Dengan niat yang ikhlas, ilmu yang tinggi, dan amal yang luas, Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) akan membuka jalan-jalan secara tidak terduga. Maka, kita optimis untuk mencapai tujuan HMI tersebut. HMI berpandangan bahwa tangan di atas lebih mulia dari pada tangan di bawah. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. HMI hadir untuk memberi, bukan meminta. *You have to have a dream before your dream come true* (Kamu memiliki mimpi sebelum mimpimu menjadi kenyataan). HMI memiliki mimpi (*dream*). Impian HMI di-*carry over* (digenggam) para anggota, kader, dan alumninya.

Dengan demikian, seperti kata John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat tahun 1960-an, sebagaimana dapat disimak dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat, “*Ask what you can do for your country, not your country can do for you!*”. Artinya: tanyakan apa yang dapat kamu berikan untuk negaramu, bukan menanyakan apa yang dapat negaramu berikan untukmu! (dalam WHSA, 1961).

## MEMERANGI KEMISKINAN, MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

Bila pada generasi pertama HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), perjuangan

bertumpu pada mempertahankan kemerdekaan dan mengembalikan ideologi pada jalan lurus Konstitusi, baik pada era Revolusi Kemerdekaan, 1945-1950, maupun pada era Demokrasi Liberal dan Orde Lama, 1950-1965 (*cf* Sitompul, 2001:49-216 dan 291-324; Effendy, 2011:106-206; dan Latif, 2012:461-465); dan pada generasi kedua HMI, perlawanan terhadap monopoli politik dan ekonomi di era Orde Baru, 1966-1998 (*cf* Sitompul, 2001:325-522; Latif, 2012:503-722; dan Effendy, 2011:181-396); maka pada generasi ketiga HMI, perjuangannya mengawal kebijakan pengelolaan negara di era Orde Reformasi, 1998 hingga sekarang, menuju tujuan bernegara, masyarakat adil dan makmur, yang sesuai dengan tujuan organisasi HMI (*cf* Effendy, 2011:397-447; dan PB HMI, 2013:2 dan 79).

Dengan demikian, bukan semata-mata HMI tampil membuktikan dirinya sebagai kader umat dan kader bangsa, melainkan juga tampak bahwa derap perjuangan antar generasi di HMI merupakan bagian sekaligus cerminan dari eksistensi dan perubahan di masyarakat. Mohamad Hatta (1979), Wakil Presiden Indonesia yang pertama, 1945-1956, pernah menyatakan:

[...] masyarakat tidak pernah diam, alias senantiasa berubah. Pokok dari segala perubahan masyarakat ialah perjuangan manusia untuk hidup dan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik dari pada yang sudah didapat. Manusia tidak putus berusaha memperbaiki syarat hidupnya (Hatta, 1979:51).

Sampai saat ini, definisi dan ukuran spesifik kemakmuran tidak pernah dirumuskan secara universal dan tegas. Tiap lembaga negara, atau para akademisi, memiliki definisinya masing-masing, dan tidak ada definisi negara yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Di dalam rumusan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), situasinya sama. Pasal 9 Anggaran Dasar HMI, misalnya, hanya menyatakan bahwa HMI merupakan alat perjuangan untuk mentransformasikan nilai-nilai ke-

Islam-an yang membebaskan (*liberation force*) dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum miskin (*dhū'afa*) dan kaum tertindas (*mustadh'afin*). Kendati begitu, kata pertama yang harus diperangi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur adalah kemiskinan (Madjid, 1999:119-136).

Soerjono Soekanto (2003) menempatkan kemiskinan sebagai masalah sosial nomor satu, yang diikuti permasalahan sosial lainnya. Itu menunjukkan bahwa kemiskinan adalah persoalan utama, sebab dalam kemiskinan tidak ada keadilan, apalagi kemakmuran (Soekanto, 2003:365-394). Dalam konklusi terekstrim, boleh juga dikatakan bahwa pada akhirnya, tidak ada negara apabila membiarkan atau memelihara kemiskinan (Budiardjo, 1992:38-49). Negara menjadi sia-sia, atau bahkan dapat dikatakan sebagai penindas, bila kemiskinan masih terus merajalela di antara penduduknya.

Jadi, manakala HMI ikut ambil bagian dalam gerakan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka dalam tarikan nafas yang sama, artinya HMI secara definitif wajib memerangi kemiskinan didalam negara yang dipertahankannya ini. Islam – sebagai acuan perjuangan HMI – mengajarkan bahwa memberantas kemiskinan dapat melalui *zakat*, *shodaqoh*, dan *infaq* (Siroj, 2006:376 dan 377); sedangkan dalam tataran ber-negara dikenalkan istilah “pajak”, yang intinya sama saja, yakni memberantas kemiskinan untuk menuju masyarakat adil dan makmur (Siroj, 2006:377-378).

Kendati penarikan dan pengelolaan pajak oleh negara dapat dijadikan salah satu instrumen pemberantasan korupsi, namun setelah melihat beberapa karya ahli ilmu hukum dan politik, pada tahun 1970-an, Juergen Habermas, anggota paling terkenal dari Mazhab Frankfurt generasi kedua di bidang penelitian sosial, memandang bahwa negara tidak akan mampu melindungi rakyat dari ekses terburuk suatu krisis dalam ekonomi kapitalis, karena kemampuannya mengumpulkan pajak untuk mendukung

program kesejahteraan sangatlah terbatas (dalam Hart, 2002).

Bagi Juergen Habermas, hal itu memperlihatkan adanya batas keabsahan negara, karena semakin ia (negara) tidak mampu melindungi rakyat dari krisis ekonomi, maka semakin sedikit jaminan keabsahan yang bisa diperoleh negara (dalam Hart, 2002:213). Maka, kalau begitu, negara bukan semata-mata harus memaksimalkan instrumen pajak, melainkan juga mesti mewujudkan sistem, baik struktur maupun kultur, yang memberantas kemiskinan.

Yusuf Qardhawi, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Bagir al-Habsyi (2002) mengemukakan *Hadits* dari Nabi Muhammad SAW (*Salallahu Alaihi Wassalam*), yang bersabda: “Zakat diambil dari orang-orang kaya mereka, untuk diberikan kepada kaum fakir-miskin mereka”. Lalu, *Hadits* dari Nabi Muhammad SAW selanjutnya menyatakan, “Tiada kewajiban sedekah (zakat), kecuali bagi pemilik kekayaan” (dalam al-Habsyi, 2002:281-282).

Menurut Muhammad Bagir al-Habsyi (2002:273), dalam *Al-Qur'an*, kata “zakat” disebutkan sebanyak tiga puluh dua kali, diantaranya dalam firman Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) didalam *Al-Qur'an*, surah *Al-Baqarah*, ayat 43: “[...] dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku-lah bersama orang-orang yang ruku” (*cf* Depag RI, 1982/1983; dan al-Habsyi, 2002:273). Jika melihat sejarah Islam di masa khalifah, terkuak bahwa mereka yang telah cukup nasabnya, tetapi tidak mau membayarnya, diperangi (Anam, 2013).

Dengan demikian, zakat atau pajak merupakan alat para pemimpin negara untuk memerangi kemiskinan (Shihab, 2000:456-457). Itu dilakukan lantaran kemiskinan merupakan musuh negara (*cf* Shihab, 2000:449-458; dan Schroder, 2010:399 dan 409). Apabila pemimpin tidak peduli, atau tidak mampu memberantas kemiskinan, maka pemimpin itu telah mendurhakai rakyatnya. Padahal, doa orang miskin dan tertindas

langsung diterima Allah SWT.

Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (2012), yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal RA (*Radhiallahu Anhu*), saat diutus untuk berdakwah ke Yaman, dengan menyatakan: “Dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada *hijab* (penghalang) antara doanya itu dengan Allah SWT” (dalam al-Bukhari, 2012).

Jadi, berhati-hatilah siapa pun yang telah bernasab untuk membayar zakat, namun tidak membayarnya. Sebab, bukan saja orang kaya yang tidak mau membayar pajak atau zakat harus diperangi, atau kini dipenjarakan, karena mereka ikut melestarikan kemiskinan, melainkan juga bukan tidak mungkin mendorong orang-orang miskin yang terzalimi sehingga mendoakan hal-hal buruk kepadanya.

Dalam Islam, kemiskinan berdekatan dengan kekufuran. *Kufur* artinya menutup, karena pada orang miskin tertutup pintu keadilan dan kemakmuran (Shihab, 2000:450). Bukan saja tertutup dari beroleh kesehatan dan tertutup dari mendapat kecerdasan serta tertutup dari kemampuan beroleh kebutuhan dasarnya, melainkan juga kemiskinan dan – terutama – kekufuran artinya tertutup dari ruang-ruang sosial, apalagi politik. Seperti orang yang terpojok, maka bagi orang miskin hanya ada satu pilihan: maju, melawan atau berontak.

Itu sebabnya, Amartya Sen, peraih Nobel tahun 1998 dalam bidang ekonomi asal India, menyatakan bahwa saudara kembar kemiskinan itu adalah kericuhan dan pemberontakan (*cf* Faz, 2007; dan Sen, 2007). Uang IDR (Rupiah Indonesia) 20,000 saja yang diberikan, rentan membuat ratusan orang miskin berebut dan sebagian mati terinjak-injak. Mungkin, bagi sebagian mereka, lebih baik mati daripada hidup miskin. Fenomena ini, dalam kadar tertentu, mirip dengan situasi perang kemerdekaan Indonesia (1945-1950), yang memekikkan dan mempraktekan motto “Merdeka atau Mati!”.

Soekarno (1965), Presiden Indonesia pertama, 1945-1965; dan Mohamad Hatta (2005), Wakil Presiden Indonesia pertama, 1945-1956, sebagaimana yang tertera pula dalam Teks Pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, menegaskan bahwa hanya dengan pintu gerbang kemerdekaan, maka kita akan mampu menuju masyarakat adil dan makmur. Secara tidak langsung, Bung Karno – sapaan Soekarno – dan Bung Hatta – panggilan Mohamad Hatta – hendak mengatakan bahwa dengan merdeka, kemungkinan besar, kemiskinan dapat dienyahkan (Soekarno, 1965; dan Hatta, 2005 dan 2012).

Jadi, itulah keharusan dan idaman dari makna Indonesia merdeka. Sebab, semakin luas kemiskinan, maka efek lanjutannya yang negatif akan bertubi-tubi, diantaranya semakin jauh dari kemakmuran, semakin dekat pada rasa tidak aman, dan semakin tidak stabil negara, hingga pada akhirnya, sama artinya dengan belum merdeka dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Dalam situasi semacam itu, orang kaya merasa was-was hidup dan bertempat tinggal di dalam negara dan berdekatan dengan masyarakat miskin. Akhirnya, sesama orang kaya cenderung membentuk pulau yang jauh dari lautan kemiskinan. Negara pun hancur akibat kian bertambahnya orang miskin (Chaldun, 1962:168-173). Dengan demikian, pembangunan menjadi tidak ada artinya manakala orang miskin, hampir miskin atau sangat miskin, semakin bertambah (Atmoko, 2014; dan Susanti *et al.*, 2015).

Kondisi pembangunan yang membuat orang miskin semakin miskin dan orang kaya bertambah kaya (*the rich become richer and the poor become poorer*), diukur dengan *coefficient Gini Ratio*. Rasio ini dihitung mulai dari angka 0, yang artinya seluruh kekayaan negara dimiliki sama rata oleh seluruh penduduk, hingga ke angka 1 yang artinya seluruh kekayaan negara hanya dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang (Tarigan, 2004).

Dalam konteks Indonesia kontemporer,

[www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) (10/10/2014) mengabarkan bahwa betapa pun terdapat penurunan angka kemiskinan dari 23.4 persen pada tahun 1999 menjadi 11.4 persen pada bulan Maret 2014, akan tetapi ketimpangan sosial telah meningkat tajam sejak pemulihan dari krisis keuangan Asia. *Gini Index Indonesia* meningkat dari angka 0.30 pada tahun 2000 menjadi 0.41 pada tahun 2013. Perkembangan terakhir angka *Gini*, rasio tadi tampaknya jauh saja dari angka 0, sekaligus kian mendekati angka 1 (dalam [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), 10/10/2014).

Artinya, kondisi perekonomian Indonesia mutakhir kian jauh dari keadaan seluruh kekayaan negara dimiliki secara sama rata oleh seluruh penduduknya, sekaligus semakin mendekati keadaan dimana seluruh kekayaan negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang saja. Singkat kata, orang miskin yang menderita di negeri ini semakin banyak.

Ketika keadaan perekonomiannya seperti itu, maka bukan sesuatu yang mengada-ada, bahkan tidak pula bertendensi – dalam pengertian negatif – hendak menentang arus besar (*mainstream*) demokrasi, ketika bertanya: sebenarnya, apa faedah dari demokrasi didalam masyarakat yang keadaan masyarakat miskinnya kian bertambah? Sebab, di masyarakat yang jumlah orang miskinnya semakin banyak, demokrasi (pemilihan langsung) cenderung menjadi peristiwa primitif dan tidak substansial. Dalam situasi semacam itu, orang miskin memberi suara karena politik instan, yaitu politik uang (*money politic*).

Dalam sistem ekonomi uang, sulit dipungkiri bahwa sejumlah orang miskin memerlukan uang yang bersifat segera, sedangkan para politisi, calon pemimpin negara, membutuhkan suara. Maka, tidak jarang orang miskin “menjual suaranya” untuk beroleh uang, sedangkan para politisi, calon pemimpin negara, “membeli suara orang miskin” agar beroleh suara dan menjadi pemimpin negara. Artinya, hak suara pemilih

dalam arena demokrasi sebagai harga untuk harapan hidup yang lebih baik, harga menuju kesejahteraan, dan harga untuk memberantas kemiskinan, dikanvaskan oleh politik uang.

Pintu kecerdasan yang tertutup, akibat kemiskinan dan kekufuran, berkontribusi dan membuat suara yang dimiliki oleh seorang penduduk miskin dipergunakan agar bisa makan untuk hari ini dan esok, namun mengabaikan faedah-faedah lainnya dalam jangka waktu – setidaknya-tidaknya – 5 tahun masa kepemimpinan para pemimpin negara. Tampak bahwa tidak ada kecocokan antara harga (uang yang diperoleh si miskin) dengan suara yang diberikannya dalam pemilihan langsung. Sebab, di satu pihak, nilai suara yang diberikannya berlaku selama 5 tahun untuk politisi yang memperoleh suara; sedangkan di pihak lain, uang yang diperoleh si miskin dari praktik “jual suara” habis seketika atau habis dalam beberapa hari saja.

Itulah sebabnya, rasional belaka manakala muncul anggapan bahwa demokrasi yang dibangun dalam keadaan digerogoti kemiskinan tidak akan memberi manfaat apa-apa selama demokrasi tidak menghasilkan pemimpin negara yang *concern* (memperhatikan) dan mampu memerangi kemiskinan, sekaligus mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan data dari surat kabar *Koran Sindo* (16/9/2015), di Indonesia banyak penduduk yang miskin disebabkan faktor ketiadaan pekerjaan. Dalam pertautan antara pendidikan dan dunia kerja, Didin Saripudin (2010) mengemukakan bahwa kira-kira dalam 15 tahun terakhir di Tanah Air, tampak bahwa para lulusan universitas semakin banyak yang menganggur.

Berpijak dari sejumlah data yang dikumpulkan, Didin Saripudin (2010) selanjutnya menerangkan bahwa pada tahun 1989 dan 1995, laju peningkatan jumlah penganggur lulusan PT (Perguruan Tinggi) adalah 22.73 persen per tahun, SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) adalah 14.97 persen;

dan lulusan SD (Sekolah Dasar) dan putus sekolah adalah 29.70 persen. Laju penganggur lulusan PT bentuk lainnya, seperti Akademi, sebanyak 61,007 orang pada tahun 1989 dan 241,413 pada tahun 1995.

Persentase pertumbuhan penganggur lulusan Universitas terhadap total angkatan kerja menempati posisi tertinggi kedua setelah lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas), yakni: 10.93 persen tahun 1989 (SMA = 16.87 persen) dan 12.36 persen tahun 1995 (SMA = 18.09 persen). Sejak 1997 sampai 2004, jumlah penganggur terbuka di Indonesia terus menanjak, dari 4.18 juta jiwa menjadi kurang lebih 11.35 juta jiwa. Sebagian besar diantaranya dialami generasi usia muda (Saripudin, 2010:128).

Artinya, sebagian besar angkatan muda negeri ini termasuk dalam kelompok angka penganggur terbuka dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Kehidupan mereka menjadi beban bagi orang lain. Data tahun 2001 memperlihatkan jumlah penganggur muda mencapai 6.1 juta jiwa (sekitar 76 persen dari keseluruhan jumlah penganggur). Tingkat penganggur pada kelompok usia muda sekitar 15 persen di daerah pedesaan dan 25 persen di perkotaan.

Selanjutnya, sebagian dari mereka yang menganggur di Tanah Air itu pergi ke negara lain untuk beroleh pekerjaan, meski harus bersedia menerima resiko dipermalukan, disiksa, diperbudak, dan diperkosa (Balitbanginfo, 2014:31-32). Sebagian lagi dari mereka yang tidak mendapat pekerjaan tetap menjadi pengangguran, yang memerangkap mereka dalam kemiskinan. Pada pihak yang lain, khususnya para penyelenggara negara, seperti membiarkan begitu saja kenyataan itu. Padahal, mereka (orang-orang miskin yang bekerja ke luar negeri) pergi tanpa bantuan, bahkan malah rela diperas oleh oknum pejabat atau pegawai negara, agar bisa bekerja, sehingga keluar dari belenggu kemiskinan. Mereka pergi ke luar negeri juga karena Indonesia tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Dalam hal ini, pegawai negara telah lama diwacanakan sebagai penghambat pertumbuhan lapangan kerja, yang terkenal dengan perkataan sarkasme, “*kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah?*”. Para pegawai negara itu sesungguhnya pelaksana dari pemegang kebijakan negara, atau disebut juga pejabat negara, yang setelah reformasi, dipilih melalui sistem dan demokrasi, kembali kepada siklus demokrasi dalam lautan kemiskinan.

Lantaran pemegang kebijakan negara dikendalikan oleh para pejabat negara yang dipilih melalui sistem dan demokrasi, maka di samping melalui kebijakan zakat dan/atau pajak, sesungguhnya kebijakan negara yang mempermudah penciptaan lapangan kerja merupakan tugas pokok mereka (Shihab, 2000:452 dan 457-458). Kunci pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberi pekerjaan dan berpendapatan kepada pengangguran. Bila 1 penganggur memperoleh pekerjaan, dengan *dependency ratio* 4.5, maka 4.5 orang miskin berubah menjadi tidak miskin.

Artinya, para pejabat negara harus mampu merumuskan anggaran dan kebijakan sedemikian rupa agar dengan pola anggaran yang tersedia, mampu sebanyak-banyaknya menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, tujuan dan target dari rumusan anggaran dan kebijakan negara adalah memperbanyak jumlah orang miskin yang berubah menjadi tidak miskin, sehingga posisi ekonomi orang miskin naik menjadi orang yang hidup sejahtera.

Bila melihat negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, tampak bahwa orang miskin dibantu dan dijamin oleh negara secara permanen melalui program *welfare* atau kesejahteraan (Mishra, 2000). Ibaratnya, di negara-negara itu tidak boleh terjadi orang miskin yang mati kelaparan. Orang miskin bukan saja diberikan rumah penampungan, melainkan juga dijamin dengan asuransi kesehatan, dan dipermudah dalam memperoleh akses atas jaminan tersebut.

Di Indonesia, program penanggulangan kemiskinan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk orang miskin, ianya baru diberikan ketika terjadi kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak (BEM UI, 2012). Selain itu, manakala ada pendatang yang mati kelaparan di Jakarta, maka bukannya dianggap sebagai tanggungjawab negara, melainkan malah “dinyanyikan” lagu: “*siapa suruh datang Jakarta, sendiri datang sendiri rasa?*”.

Pada alam pemikiran seperti itu, kemiskinan diperlakukan sebagai urusan individual (sebagai urusan orang yang mengalaminya sendiri), dan bukan disikapi sebagai urusan negara dan publik. Dalam bentuk pertanyaan retorik, orang-orang yang hidup di alam pemikiran semacam itu akan menyampaikan ujaran picik, yakni: “*siapa suruh menjadi orang miskin?*”.

## KESIMPULAN <sup>1</sup>

Akhirnya, pada saat kita kembali memperingati hari lahirnya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), marilah kita merenung dan sungguh-sungguh merealisasikan cita-cita HMI. Kita patut bertanya, setelah 68 tahun berdiri dan ikut mengawal perjalanan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara, yang sesuai dengan tujuan HMI, sejauh mana tujuan itu telah tercapai? HMI telah berhasil ikut mempertahankan kemerdekaan negara. HMI juga telah berhasil ikut meluruskan pelaksanaan ideologi dan Konstitusi negara.

Kini, HMI ditantang untuk terus menentang kebijakan negara yang menguntungkan sejumlah penduduk kaya saja,

<sup>1</sup>Makalah ini, sebelum dikemas-kini dan diedit-ulang dalam bentuknya sekarang, merupakan Naskah Pidato saya dalam Acara *Dies Natalis* HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang ke-68, yang diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2015. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mi'raj Dodi Kurniawan, alumni HMI Cabang Bandung dan sekarang sebagai Mahasiswa S-2 di Program Studi Pendidikan Sejarah SPs UPI (Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, yang telah mengedit ulang makalah ini, terutama sekali dengan melengkapi Referensinya. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam makalah ini, sepenuhnya adalah tanggungjawab akademik saya secara pribadi.

serta mengarahkan dan mengawal kebijakan yang mampu mengangkat penduduk miskin menjadi sejahtera. Kita selalu diajarkan di HMI untuk memberikan yang terbaik dari kita untuk bangsa dan negara. Maka, berikanlah, karena dengan memberi yang terbaik, kita akan memperoleh yang terbaik juga, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga HMI, seperti kata-kata bersayap dari Penglima Besar Jenderal Soedirman pada masa revolusi Indonesia, senantiasa menjadi “Harapan Masyarakat Islam” dan “Harapan Masyarakat Indonesia”.<sup>2</sup>

## Referensi

- al-Bukhari, Imam Muhammad bin Ismail. (2012). *Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Sunnah, Terjemahan.
- al-Habsyi, Muhammad Bagir. (2002). *Fiqh Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Mizan, Terjemahan.
- Anam. (2013). “Ketegasan Abu Bakar Soal Zakat”. Tersedia secara online juga di: [http://www.nu.or.id/a\\_public-m,dinamic-s,detail-ids,51-id,46384-lang,id-c,hikmah-t,Ketegasan+Abu+Bakar+Soal+Zakat-.phpx](http://www.nu.or.id/a_public-m,dinamic-s,detail-ids,51-id,46384-lang,id-c,hikmah-t,Ketegasan+Abu+Bakar+Soal+Zakat-.phpx) [diakses di Jakarta, Indonesia: 30 Oktober 2015].
- Atmoko, Citro. (2014). “Masalah Ketimpangan Masih Jadi Isu Besar”. Tersedia secara online juga di: <http://www.antaraneews.com/berita/458001/masalah-ketimpangan-masih-jadi-isu-besar> [diakses di Jakarta: 30 Oktober 2015].
- Balitbanginfo [Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi]. (2014). *Data dan Informasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
- Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, Terjemahan.
- Barton, Greg. (2003). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, Terjemahan.
- BEM UI [Badan Eksekutif Mahasiswa]. (2012). *Kajian Energi, Bagian 1: BBM*. Jakarta: Pusat Kajian dan Studi Gerakan BEM UI [Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia].
- Budiardjo, Miriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaldun, Ibn. (1962). *Filsafat Islam tentang Sedjarah: Pilihan dari Muqaddimah, Karangan Ibn Chaldun dari Tunis (1332-1406)*. Djakarta: Penerbit Tintamas, Terjemahan.
- Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia]. (1982/1983). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Effendy, Bahtiar. (2011). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, edisi digital.
- Faz, Ahmad Thoha. (2007). *Titik Ba: Paradigma Revolusioner dalam Kehidupan dan Pembelajaran*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Hart, K. (2002). “Jacques Derrida” dalam Peter Beilharz [ed]. *Teori-teori Sosial: Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Terjemahan.
- Hatta, Mohamad. (1979). *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Hatta, Mohamad. (2005). *Indonesia Merdeka (Indonesia Vrij)*. Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM.
- Hatta, Mohamad. (2012). *Ke Arah Indonesia Merdeka*. Jakarta: Yayasan Hatta.
- Koran Sindo* [suratkabar]. Jakarta, Indonesia: 16 September 2015.
- Latif, Yudi. (2012). *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, edisi digital.
- Lunandi, A.G. (1987). *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Madjid, M. Nurcholish. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Madjid, M. Nurcholish. (1999). *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, edisi digital.
- Malik, Kholis. (2002). *Konflik Ideologi: Kemelut Asas Tunggal di Tubuh HMI*. Yogyakarta: Insani Press.
- Mishra, Ramesh. (2000). *Globalization and the Welfare State*. London: McMillan.
- PB HMI [Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam]. (2013). *Hasil-basil Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-XVIII*. Jakarta: Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam.
- Piliang, Yasraf Amir. (2011a). *Bayang-Bayang Tuhan: Agama dan Imajinasi*. Jakarta: Mizan Publika.
- Piliang, Yasraf Amir. (2011b). *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan*. Bandung: Penerbit Matahari.
- Rachman, Budhy Munawar. (2011). *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Jilid 2, H-L*. Jakarta: Yayasan

<sup>2</sup>**Pernyataan:** Dengan ini saya menyatakan bahwa makalah ini, beserta seluruh isinya, adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik. Makalah ini juga belum direvisi dan belum diterbitkan oleh jurnal ilmiah lain.

- Abad Demokrasi, edisi digital.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Psikologi Organisasi*. Jakarta: Penerbit Prenhallindo, Terjemahan.
- Saptaningrum, Indriaswati D. (2011). “Sebuah Jerat Bernama Masa Lalu” dalam *AZASI: Majalah Analisis Dokumentasi dan Hak Azasi Manusia*, Edisi Maret – April. Jakarta: Penerbit ELSAM [Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat].
- Saripudin, Didin. (2010). *Interpretasi Sosiologis dalam Pendidikan*. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Schroder, Peter. (2010). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung Fuer die Freiheit, Terjemahan.
- Sen, Amartya. (2007). *Kekeerasan dan Ilusi tentang Identitas*. Tangerang: Marjin Kiri, Terjemahan.
- Shaleh, Hasanuddin M. (1996). *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*. Yogyakarta: Kelompok Studi Lingkaran.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Siroj, Said Aqil. (2006). *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Sitompul, Agussalim. (1976). *Sejarah Perjuangan HMI: Tahun 1947-1975*. Surabaya: Penerbit Bina Ilmu.
- Sitompul, Agussalim. (1995). *Historiografi HMI, 1947-1993*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Sitompul, Agussalim. (2001). “Pemikiran HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) tentang Keislaman – Keindonesiaan, 1947-1997”. *Disertasi Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Program Pascasarjana IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Sunan Kalijaga.
- Sitompul, Agussalim. (2010). “Refleksi 63 Tahun Perjuangan HMI, Mendiagnosa Lima Zaman Perjalanan HMI: Suatu Tinjauan Historis dan Kritis terhadap Fase-fase Perjuangan HMI dalam Menjawab Tantangan Masa Depan”. *Makalah* dipresentasikan dalam Latihan Kader II Tingkat Nasional HMI [Himpunan Mahasiswa Islam] Cabang Malang, Jawa Timur, pada hari Senin, tanggal 20 Juni. Tersedia secara online juga di: <http://www.malang.hmi.or.id/wp-content/uploads/2013/06/Refleksi-63-Tahun-Perjuangan-HMI-Agus-Salim-Situmpul.pdf> [diakses di Jakarta, Indonesia: 30 Oktober 2015].
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekarno. (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi: Djilid Kedua*. Djakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Susanti, Inda *et al.* (2015). “Jumlah Rakyat Miskin Melonjak”. Tersedia secara online juga di: <http://nasional.sindonews.com/read/1045172/149/jumlah-rakyat-miskin-melonjak-1442372620> [diakses di Jakarta, Indonesia: 30 Oktober 2015].
- Susanto, Eko Harry. (2014). “Media, Baru, Kebebasan Informasi, dan Demokrasi di Kalangan Generasi Muda”. Tersedia secara online juga di: <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/kidFik/article/viewFile/1246/1283> [diakses di Jakarta, Indonesia: 30 Oktober 2015].
- Tanja, Victor. (1982). *Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- WHSA [White House Signal Agency]. (1961). “Inaugural Address, 20 Januari 1961”. Tersedia secara online juga di: <http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/BqXIEM9F4024ntFl7SVAjA.aspx> [diakses di Jakarta, Indonesia: 30 Oktober 2015].
- [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) [diakses di Jakarta, Indonesia: 10 Oktober 2014].